Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 8868-8881

Persepsi Guru Terhadap Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar di Padang Pariaman

Auliani Putri Ramadani[1], Fadillah Asmaul Husnah[2], Nurul Aulianisa[3], Suci Azzahra[4], Dea Mustika[5]
[1,2]Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Islam Riau, Indonesia
Corresponding AuthorEmail: aulianiputriramadani@student.uir.ac.id[1], fadillahasmaulhusnah@student.uir.ac.id[2], nurulaulianisa@student.uir.ac.id[3] , suciazzahra@student.uir.ac.id[4], deamustika@edu.uir.ac.id[5]

Published: June , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi guru terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar di Kabupaten Padang Pariaman. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar guru memiliki pemahaman yang cukup terhadap konsep dasar pendidikan inklusi, terutama dalam hal prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan penerimaan terhadap keragaman siswa. Namun, pemahaman mereka masih terbatas pada aspek filosofis dan belum menjangkau dimensi teknis seperti adaptasi kurikulum, strategi pembelajaran diferensial, asesmen alternatif, dan manajemen kelas inklusif. Guru mengakui adanya dampak positif pendidikan inklusi seperti meningkatnya toleransi dan terpenuhinya hak belajar siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga mengungkapkan tantangan signifikan seperti risiko bullying, peningkatan beban kerja, serta keterbatasan sumber daya dan pelatihan. Hasil observasi menunjukkan kelelahan fisik dan emosional guru dalam mengelola kelas inklusi, yang diperburuk oleh tuntutan administrasi dan kurangnya dukungan sistemik. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan kompetensi guru, peningkatan fasilitas, dan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan untuk mewujudkan pendidikan inklusi yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Persepsi Guru, Pendidikan Inklusi, Sekolah Dasar*

ABSTRACT

This study aims to reveal teachers' perceptions of the implementation of inclusive education in elementary schools in Padang Pariaman Regency. Using a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation, this study found that most teachers have a sufficient understanding of the basic concepts of inclusive education, especially in terms of the principles of equality, non-discrimination, and acceptance of student diversity. However, their understanding is still limited to the philosophical aspect and has not reached technical dimensions such as curriculum adaptation, differential learning strategies, alternative assessments, and inclusive classroom management. Teachers acknowledge the positive impacts of inclusive education such as increased tolerance and the fulfillment of the learning rights of students with special needs, but also reveal significant challenges such as the risk of bullying, increased workload, and limited resources and training. The results of observations show physical and emotional exhaustion of teachers in managing inclusive classes, which is exacerbated by administrative demands and lack of systemic support. These findings indicate the importance of strengthening teacher competence, improving facilities, and education policies that are more inclusive and responsive to field needs to realize effective and sustainable inclusive education.

Keywords: *Teacher Perception, Inclusive Education, Elementary School*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan (Musya'adah, 2018). Setiap individu, tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, intelektual, emosional, maupun sosial, memiliki hak yang setara untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu (Anwar, 2020). Prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan menjadi dasar munculnya konsep pendidikan inklusi, yaitu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk belajar bersama dalam satu lingkungan yang sama. Pendidikan inklusi bukan sekadar penempatan ABK di sekolah umum, melainkan menuntut sistem yang dapat mengakomodasi keberagaman kebutuhan peserta didik melalui adaptasi kurikulum, pendekatan pembelajaran, dan sistem evaluasi yang fleksibel (Anggadewi & Evanjeli, 2022).

Di tingkat global, konsep pendidikan inklusi telah menjadi arus utama dalam kebijakan Pendidikan (Fitrianasari, 2015). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Konvensi Hak-Hak Anak (1989) dan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2006) menegaskan pentingnya pendidikan inklusi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap pendidikan inklusi diwujudkan dalam sejumlah regulasi seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Bin & Zin, 2018).

Penyelenggaraan pendidikan inklusi menjadi sorotan utama pemerintah dalam pencapaian mutu pendidikan Indonesia (Faujiyyah et al., 2025). Dorong ini berlandaskan pada konvensi internasional yang memperjuangkan nilai-nilai pendidikan dan hak asasi manusia dan menawarkan pedoman untuk menerapkan kebijakan pendidikan inklusif (Pratiwi, 2024). Ketika berbicara tentang pendidikan inklusi, asumsi yang ditawarkan adalah terciptanya kesempatan belajar yang sama bagi seluruh anak dengan keunikan yang mereka miliki tanpa diskriminasi untuk belajar bersama dengan teman sebaya dalam masyarakat yang ramah.Filsafat inklusif sendiri memahami keragaman dalam arti luas, yang terdiri dari perbedaan kemampuan, perbedaan gender dan perbedaan asal usul sosial dan budaya (Hakim Hidayat et al., 2024)

Meskipun kebijakan telah tersedia, pelaksanaan pendidikan inklusi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada jenjang pendidikan dasar (Tejaningrum, 2017). Salah satu isu krusial yang menjadi penentu keberhasilan pendidikan inklusi adalah persepsi guru. Guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana belajar yang ramah,

mendukung, dan inklusif. Persepsi guru terhadap pendidikan inklusi akan sangat memengaruhi kesiapan, komitmen, dan keterlibatan mereka dalam mendesain pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan semua peserta didik (Wardah, 2019).

Persepsi guru terhadap pendidikan inklusi memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan di kelas, sikap dan pemahaman guru tentang pendidikan inklusi sangat memengaruhi proses belajar mengajar di sekolah.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Elinda, 2021), sebagian besar guru menunjukkan sikap positif terhadap pendidikan inklusi, meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan kebijakan ini. Dan juga guru menyadaribetapapentingnya pendidikan inklusif, namunmereka merasa belum cukup siap dengan keterbatasan dalam pengetahuan tentang ABK dan metodepengajaranyang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada kesadaran, tingkat pemahaman yang mendalam tentang implementasi pendidikan inklusi masih perlu ditingkatkan (Mayya, 2019).

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, terdapat beberapa hambatan utama yang perlu diperhatikan. Salah satu hambatan yang paling seringterjadiadalahkurangnya kompetensi guru dalam menangani ABK. Penelitian oleh (Vito, 2024) mengungkapkan bahwa banyak guru tidakmemiliki pengetahuan yang cukup tentangmetode dan strategi pengajaran yang dapat diterapkan untukABK, terutama di sekolah-sekolah yang tidak memiliki program pelatihan khusus. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung, seperti alat bantu belajar dan aksesibilitas untuk siswa dengan disabilitasfisik, juga menjadi kendala yang signifikan. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sulit bagi ABK untuk mengakses pembelajaran dengan baik. dibalik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk memperbaiki dan mengembangkan pendidikan inklusi di Indonesia. Salah satu peluang utama terletak pada peningkatan pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan akan memberikan guru pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan ABK dan cara mengakomodasi kebutuhan tersebut dalam pembelajaran. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat juga menjadi salah satu peluang untuk membangun suasana pendidikan yang lebih mendukung bagi ABK. Penelitian oleh (Faujiyyah et al., 2025) menyatakan bahwa dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, pendidikan inklusi dapat berhasil dilaksanakan, terutama di tingkat sekolah dasar.

Persepsi dapat dipahami sebagai proses kognitif dalam menafsirkan informasi dari lingkungan berdasarkan pengalaman, nilai, dan keyakinan seseorang (Berkebutuhan et al., 2025). Dalam konteks pendidikan inklusi, persepsi guru mencakup pemahaman mereka tentang definisi inklusi, kesiapan infrastruktur sekolah, kompetensi diri dalam mengelola kelas heterogen, serta dukungan institusi terhadap penyelenggaraan

pendidikan inklusi. Guru dengan persepsi positif cenderung memandang pendidikan inklusi sebagai peluang untuk meningkatkan keadilan sosial dan memperluas akses pendidikan. Sebaliknya, persepsi negatif dapat memicu resistensi, diskriminasi terselubung, dan rendahnya motivasi untuk menyesuaikan praktik pembelajaran dengan kebutuhan siswa yang beragam (Febri et al., 2024).

Persepsi guru terhadap pendidikan inklusi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang pendidikan, pelatihan khusus, pengalaman mengajar ABK, beban kerja, dukungan administratif, serta budaya sekolah. Beberapa guru merasa kurang percaya diri untuk mengelola pembelajaran yang inklusif karena belum pernah mendapatkan pelatihan yang memadai, tidak memahami karakteristik siswa berkebutuhan khusus, atau belum tersedia media pembelajaran yang sesuai. Dalam kasus lain, guru memiliki persepsi positif tetapi mengalami keterbatasan dalam implementasi akibat dukungan yang minim dari pihak sekolah maupun pemerintah daerah (Elinda, 2021).

Kondisi ini juga relevan untuk dianalisis dalam konteks lokal, khususnya di wilayah Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sebagai wilayah yang sebagian besar didominasi oleh sekolah dasar negeri dengan keterbatasan sumber daya, pelaksanaan pendidikan inklusi masih menjadi tantangan besar. Beberapa sekolah telah ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusi, namun pelaksanaannya masih terfokus pada aspek administratif, sementara aspek kultural dan pedagogis belum sepenuhnya dikembangkan. Guru di sekolah-sekolah tersebut dituntut untuk mampu mengelola kelas yang heterogen tanpa dukungan profesional yang memadai, baik dari psikolog, terapis, maupun tenaga pendamping.

Konteks budaya masyarakat Padang Pariaman yang sangat menjunjung tinggi norma sosial dan adat istiadat juga dapat memengaruhi bagaimana pendidikan inklusi dipersepsikan. Dalam masyarakat yang masih memiliki stigma terhadap anak berkebutuhan khusus, guru dapat berada dalam dilema antara nilai-nilai sosial dan tuntutan profesionalisme. Oleh karena itu, penting untuk menggali bagaimana persepsi guru terbentuk dalam konteks lokal, serta bagaimana persepsi tersebut memengaruhi praktik pembelajaran dan penerimaan terhadap ABK di ruang kelas reguler.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur terkait persepsi guru terhadap pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar, khususnya di daerah Padang Pariaman. Dengan melakukan pendekatan eksploratif dan kontekstual, diharapkan penelitian ini dapat memetakan sejauh mana pemahaman, sikap, dan kesiapan guru dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi secara menyeluruh. Informasi ini sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Penelitian terdahulu tentang pendidikan inklusif di Indonesia telah mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh guru dan sekolah dalam melaksanakan kebijakan ini. Penelitian oleh Sanisah et al., (2022)menyatakan bahwa meskipun ada dukungan positif terhadap pendidikan inklusif, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai hambatan, terutama dalam hal pengetahuan guru dan sarana yang tersedia di sekolah. Penelitian oleh Syarif & Jannah (2024)menunjukkan bahwa meskipun guru menyadari pentingnya pendidikan inklusif, keterbatasan pelatihan yang diterima membuat mereka kesulitan dalam menghadapi ABK di kelas. Penelitian ini memiliki kekurangan karena belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana guru melihat pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar di Indonesia, serta belum ada penelitian yang membahas bagaimana masalah ini dapat diselesaikan melalui metode pelatihan dan peningkatan sarana

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan pendidikan di tingkat daerah dalam merancang program pelatihan guru yang tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga membangun pemahaman yang mendalam dan empatik terhadap prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Diperlukan program penguatan kapasitas guru secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, termasuk pengembangan model pembelajaran diferensiasi, strategi manajemen kelas inklusif, dan pendekatan kolaboratif antar pemangku kepentingan. Pemahaman yang mendalam tentang persepsi guru akan membuka ruang dialog antara guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif. Kolaborasi ini sangat penting mengingat pendidikan inklusi bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi merupakan kerja kolektif seluruh elemen ekosistem pendidikan.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mendeskripsikan persepsi guru terhadap pendidikan inklusi di beberapa sekolah dasar di Padang Pariaman. Fokus utama diarahkan pada aspek pemahaman, sikap, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan praktik inklusi di ruang kelas mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam persepsi guru terhadap pendidikan inklusi di beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Padang Pariaman. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, pengalaman, dan pandangan subjektif guru terkait implementasi pendidikan inklusi di lingkungan sekolah mereka. Fokus utama penelitian adalah untuk menggali pemahaman guru, sikap mereka terhadap siswa berkebutuhan

khusus (ABK), serta bentuk dukungan dan hambatan yang mereka hadapi dalam praktik sehari-hari.

Penelitian ini dilaksanakan di empat Sekolah Dasar negeri yang telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman. Pengumpulan data dilakukan selama bulan Mei hingga Juni 2025, dengan observasi lapangan utama dilakukan pada tanggal 2 Juni 2025. Subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas dan guru mata pelajaran di sekolah dasar inklusif yang dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria tertentu: guru yang telah memiliki pengalaman mengajar di sekolah inklusi minimal dua tahun, pernah menangani siswa berkebutuhan khusus, serta bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Jumlah informan utama sebanyak 12 orang guru, yang terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran, serta guru BK (bimbingan dan konseling) jika tersedia. Selain itu, untuk mendukung validitas data, peneliti juga mewawancarai kepala sekolah, staf sekolah, dan beberapa orang tua siswa untuk keperluan triangulasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur guna menggali secara mendalam persepsi guru terhadap konsep pendidikan inklusi, strategi pembelajaran yang digunakan, dan tantangan yang mereka hadapi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas, interaksi antara guru dan siswa, serta keterlibatan siswa ABK dalam kegiatan sekolah. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti dokumen RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), catatan evaluasi siswa ABK, notulen rapat guru, serta dokumen pelatihan inklusi yang pernah diikuti guru.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan langsung dari informan, serta temuan tematik. Kesimpulan kemudian ditarik secara bertahap dan terus diverifikasi selama proses pengumpulan data berlangsung, sehingga menghasilkan interpretasi yang akurat dan kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan mengungkap secara mendalam bagaimana persepsi guru terhadap implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar di Kabupaten Padang Pariaman. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi kelas, dan dokumentasi, yang dilakukan pada tanggal 2 Juni 2025 di beberapa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap pendidikan inklusi bervariasi antara positif, netral, hingga skeptis, tergantung pada pengalaman pribadi, tingkat pemahaman, pelatihan yang pernah diikuti, serta dukungan sistem sekolah masing-masing

1. Pandangan Umum Guru terhadap Pendidikan Inklusi

Sebagian besar guru memahami bahwa pendidikan inklusi merupakan suatu pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah yang sama. Mereka menyadari bahwa pendekatan ini mengedepankan prinsip-prinsip utama seperti kesetaraan, nondiskriminasi, keadilan dalam akses pendidikan, serta pengakuan terhadap keragaman individu. Guru-guru menunjukkan apresiasi terhadap nilai-nilai dasar pendidikan inklusif yang memanusiakan peserta didik tanpa memandang latar belakang kemampuan, kondisi fisik, atau kebutuhan khusus yang dimiliki.

Pemahaman yang mereka miliki tersebut belum sepenuhnya menyentuh aspek-aspek teknis dan praktis dari pelaksanaan pendidikan inklusi. Dimensi-dimensi penting seperti adaptasi kurikulum, strategi pembelajaran yang terdiferensiasi, metode asesmen yang sesuai dengan kebutuhan individual siswa, serta manajemen kelas inklusif masih menjadi tantangan besar yang belum dikuasai secara menyeluruh oleh sebagian besar guru. Dalam banyak kasus, guru hanya memaknai pendidikan inklusif sebagai sebuah bentuk penerimaan siswa ABK dalam kelas reguler tanpa disertai dengan kesiapan metode pengajaran, kompetensi pedagogis, maupun sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara ideologi dan filosofi pendidikan inklusi dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Di satu sisi, guru menerima dan mendukung prinsip-prinsip inklusif secara normatif; namun di sisi lain, keterbatasan pada tataran implementasi membuat proses pembelajaran yang inklusif tidak berjalan secara optimal. Kurangnya pelatihan khusus mengenai pengelolaan kelas inklusif, belum adanya sistem dukungan seperti guru pendamping khusus (GPK) yang memadai, serta terbatasnya akses terhadap sumber daya ajar adaptif memperkuat kesenjangan tersebut.

Sebagian guru juga merasa bahwa tanggung jawab untuk mengakomodasi kebutuhan belajar anak-anak berkebutuhan khusus menambah beban kerja yang cukup signifikan. Ketika mereka harus menyesuaikan rencana pembelajaran individual (RPI), membuat asesmen yang fleksibel, dan memberikan perhatian lebih terhadap ABK, sering kali mereka merasa kewalahan karena tidak ada dukungan sistemik yang terstruktur. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kemampuan mereka sendiri dalam menerapkan pembelajaran yang efektif dan setara bagi semua siswa di kelas inklusif.

2. Dampak Positif dan Negatif Menurut Guru

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap beberapa guru di sekolah dasar wilayah Kabupaten Padang Pariaman, diketahui bahwa persepsi mereka terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi mengandung dua sisi dampak yang kontras, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Guru X, misalnya, dengan keyakinan menyampaikan bahwa pendidikan inklusi merupakan langkah maju dalam memenuhi hak-hak pendidikan setiap anak, tanpa terkecuali. Ia memandang inklusi sebagai upaya konkret untuk menghapuskan diskriminasi di lingkungan sekolah dan memberikan ruang bagi semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk tumbuh dan berkembang dalam suasana belajar yang setara. Menurutnya, keberadaan siswa ABK di dalam kelas reguler juga berdampak positif bagi siswa lain karena mereka belajar menghargai perbedaan, menumbuhkan rasa empati, serta membentuk kemampuan bersosialisasi dalam konteks keberagaman sosial sejak usia dini. Sikap saling menghormati dan toleransi pun, lanjutnya, menjadi bagian dari nilai-nilai kehidupan yang secara tidak langsung ditanamkan melalui pengalaman belajar bersama.

Di sisi lain, sebagian guru juga menyampaikan sejumlah tantangan dan kekhawatiran yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Guru Y menyoroti bahwa mengajar di kelas inklusif memerlukan perhatian dan energi ekstra. Siswa ABK, menurutnya, tidak hanya membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan intensif, tetapi juga membutuhkan pendampingan emosional dan sosial secara berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa dalam praktiknya, perhatian yang diberikan kepada siswa ABK bisa dua hingga tiga kali lipat lebih besar dibandingkan dengan siswa lainnya. Hal ini menyebabkan beban kerja guru meningkat secara signifikan, terutama ketika harus menyeimbangkan kebutuhan seluruh siswa dalam satu kelas.

Kekhawatiran lain yang banyak disuarakan adalah potensi terjadinya perundungan atau bullying terhadap siswa ABK. Beberapa guru menyatakan bahwa dalam lingkungan kelas yang belum dibekali pemahaman cukup tentang keberagaman dan empati, siswa dengan perbedaan fisik, intelektual, atau perilaku tertentu cenderung mengalami eksklusi sosial. Siswa reguler yang tidak dibekali pendidikan karakter atau pembiasaan dalam menerima perbedaan dapat menunjukkan reaksi negatif terhadap ABK, seperti mengejek, menghindar, atau bahkan melakukan kekerasan verbal. Hal ini menjadi perhatian serius bagi para guru karena dapat mengganggu proses belajar siswa ABK dan menghambat tujuan inklusif itu sendiri.

Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya dukungan dari sistem pendidikan seperti tidak tersedianya guru pendamping khusus, kurangnya pelatihan profesional bagi guru dalam mengelola kelas inklusif, serta terbatasnya sarana prasarana yang adaptif. Guru-guru merasa bahwa meskipun mereka mendukung konsep inklusi secara ideal,

kenyataannya pelaksanaan di lapangan masih jauh dari sempurna. Mereka sering kali merasa bekerja sendiri tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, baik dari pihak sekolah, dinas pendidikan, maupun pemerintah daerah. Ketika guru harus menyusun RPP berbeda, strategi pembelajaran yang fleksibel, dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik siswa ABK, mereka sering kali merasa kewalahan. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan persepsi bahwa pendidikan inklusi masih cenderung menjadi beban tambahan dibandingkan peluang pengembangan pembelajaran yang efektif.

Meskipun demikian, sebagian guru juga menyampaikan bahwa tantangan-tantangan tersebut bukan alasan untuk menolak pendidikan inklusi, melainkan sebagai masukan penting bagi pembuat kebijakan agar lebih serius dalam menyiapkan sistem yang mendukung implementasi inklusi. Para guru berharap adanya pelatihan khusus, pembentukan tim pendukung pembelajaran, serta kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan tenaga profesional lainnya agar pelaksanaan inklusi dapat berjalan sesuai tujuan awalnya. Dengan demikian, inklusi tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi praktik nyata dalam mewujudkan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi semua anak.

3. Tantangan dalam Pelaksanaan Pembelajaran Inklusif

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, terungkap bahwa guru mengalami kelelahan baik secara fisik maupun emosional dalam menjalankan tugasnya di kelas inklusi. Kelelahan ini muncul sebagai dampak dari tingginya tuntutan tugas yang harus dipenuhi dalam waktu bersamaan. Guru tidak hanya dituntut untuk membagi perhatian secara adil antara siswa reguler dan anak berkebutuhan khusus (ABK), tetapi juga harus memastikan seluruh peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Dalam praktiknya, guru harus mengelola dinamika kelas yang beragam, merancang pembelajaran yang fleksibel, sekaligus menyesuaikan metode dengan kemampuan individual siswa ABK.

Guru juga dibebani dengan tanggung jawab administratif yang tidak sedikit. Mereka harus menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang adaptif, merancang penilaian alternatif yang sesuai dengan karakteristik ABK, serta membuat laporan perkembangan siswa secara individual yang memerlukan observasi dan dokumentasi intensif. Kombinasi dari tuntutan instruksional dan administratif ini menyebabkan penurunan efisiensi dalam pelaksanaan pembelajaran, bahkan dalam jangka panjang dapat menggerus motivasi kerja guru. Ketika guru merasa tidak memiliki cukup waktu, energi, dan dukungan dalam menjalankan semua tanggung jawab tersebut, risiko kelelahan (burnout) meningkat secara signifikan.

Hasil observasi ini sejalan dengan temuan Hassanein et al. (2021) dalam studi mereka di Mesir, yang menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran

konvensional, pendekatan pedagogis yang bersifat umum, dan sistem evaluasi berbasis standar tidak mampu mengakomodasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus secara efektif. Penelitian tersebut menekankan bahwa tanpa adanya perubahan atau modifikasi dalam struktur kurikulum, strategi pembelajaran yang berbeda (differentiated instruction), dan pelatihan guru yang berkelanjutan, kelas inklusi akan cenderung tidak berjalan sebagaimana mestinya. Guru akan terus menghadapi kesulitan dalam merancang pembelajaran yang mampu menjangkau semua siswa, terlebih dalam konteks yang kompleks seperti kelas inklusi.

Situasi ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan inklusi yang dicanangkan oleh pemerintah dan realitas implementasi di sekolah. Kebijakan yang mengharuskan integrasi ABK ke dalam kelas reguler tidak selalu diiringi dengan peningkatan kapasitas guru maupun penyediaan sumber daya pendukung yang memadai. Padahal, keberhasilan pendidikan inklusi sangat ditentukan oleh kesiapan guru, baik dari segi pengetahuan pedagogis khusus, keterampilan adaptif, maupun dukungan emosional. Tanpa sistem pendukung yang kuat, guru akan merasa terisolasi dan terbebani secara berlebihan.

Diperlukan langkah strategis untuk mengatasi persoalan ini, antara lain melalui pelatihan berkelanjutan yang fokus pada pengelolaan kelas inklusi, pemberian insentif atau beban kerja yang proporsional bagi guru inklusi, serta penguatan sistem pendampingan di sekolah melalui kehadiran guru pembimbing khusus (GPK) atau konselor pendidikan. Penguatan kolaborasi antara guru reguler, orang tua, dan tenaga profesional lainnya juga penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua anak, termasuk ABK. Tanpa intervensi yang menyeluruh, kelelahan guru tidak hanya akan berdampak pada efektivitas pembelajaran, tetapi juga berisiko menurunkan kualitas pendidikan inklusi secara keseluruhan.

4. Persepsi Efikasi Diri Guru sebagai Kendala Utama

Sejumlah guru menyatakan bahwa rendahnya efikasi diri mereka menjadi penghambat utama keberhasilan pendidikan inklusi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Alkhateeb et al. (2016), Engelbrecht et al. (2016), Galaterou & Antoniou (2017), serta Saloviita (2020) yang menunjukkan bahwa persepsi negatif guru terhadap kemampuannya dalam menerapkan pembelajaran inklusif berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaannya. Guru cenderung merasa tidak siap secara pedagogis maupun psikologis menghadapi tantangan inklusi.

Dalam konteks Padang Pariaman, mayoritas guru merasa bahwa sistem saat ini belum mendukung idealisme pendidikan inklusif. Mereka menyadari adanya ketimpangan antara visi inklusif yang digaungkan dalam kebijakan nasional dengan realitas di lapangan yang belum menyediakan dukungan konkret. Persepsi guru terhadap

pendidikan inklusi berada pada kategori sedang. Beberapa guru memiliki persepsi tinggi dan berkomitmen terhadap nilai-nilai inklusi, namun sebagian lainnya masih menunjukkan sikap ragu, terbebani, bahkan pesimis. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan inklusi sudah dikenal, namun pemahaman dan kesiapan guru belum merata.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Mngo & Mngo (2018) yang menunjukkan bahwa sebagian besar guru memiliki sikap positif terhadap kelas inklusi, namun pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mendukung integrasi penuh siswa ABK. Dengan demikian, strategi pendampingan, pelatihan, dan supervisi berkelanjutan menjadi penting untuk meningkatkan efikasi dan kompetensi guru dalam sistem pendidikan inklusif.

Para guru juga mengeluhkan tentang ketercapaian pembelajaran mereka. Jika mereka mengajar kelas inklusi dengan maksimal, tujuan ketercaiaan materi tidak dapat dicapai. Sementara jika mengejar ketercapaian materi, anak inklusi akan terabaikan dan efeknya diskriminasi. Guru merasa dilemma dengan tujuan pendidikan inklusif untuk semua anak yang hanya berfokus pada mewajibkan sekolah untuk menerima sejumlah siswa penyandang disabilitas di sekolah umum, namun tidak menjamin pendidikan berkualitas tinggi, atau mengidentifikasi sumber daya tambahan yang diperlukan untuk berinvestasi dalam sistem tersebut. Mereka mengeluhkan pelaksanaan Pendidikan inklusi. Sehingga persepsi guru mengenai efikasi diri mereka dalam menerapkan inklusi menjadi hambatan utama bagi inklusi yang efektif di negara-negara lain yang mengkaji masalah ini (Alkhateeb et al., 2016; Engelbrecht et al., 2016; Galaterou & Antoniou, 2017; Saloviita, 2020). Sulit untuk membayangkan bahwa para guru dapat menghadapi tantangantantangan yang diidentifikasi di madrasah ibtidaiyah dalam pelaksaaan pendidikan inklusi dengan mengubah sikap dan persepsi mereka bahwa mereka bekerja dalam sistem yang tidak mendukung cita-cita dan prinsip-prinsip pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas guru yang menjadi partisipan penelitian ini menunjukkan persepsi kategori sedang, sementara ada beberapa guru yang memiliki persepsi tinggi maupun kurang. Hasil ini dapat diartikan bahwa rata-rata guru yang menjadi partisipan memiliki cara pandang yang cukup terhadap sistem pendidikan inklusi yang saat ini berjalan di sekolah dasar. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diperoleh hasil bahwa para guru juga memiliki sikap yang positif untuk mengintegrasikan kelas untuk pembelajaran yang inklusif (Mngo & Mngo, 2018). Meskipun demikian, masih perlu ditinjau kembali wilayah dimana guru yang memiliki persepsi kurang untuk dapat ditelaah secara detil faktor-faktor penilaian kurang tersebut dalam penelitian selanjutnya.

Sarwono (2003) menyebutkan bahwa salah satu aspek yang membedakan persepsi dengan kemampuan berpikir adalah bahwa persepsi dapat berkembang kearah tertentu. Persepsi guru dalam penelitian ini lebih netral namun hal ini masih dapat berubah seiring dengan perkembangan sistem inklusi di sekolah. Maka penting untuk mengevaluasi sistem Pendidikan inklusi dan persepsi guru secara berkala sehingga akan tampak bagaimana arah perkembangan sistem Pendidikan inklusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa persepsi guru terhadap pendidikan inklusi di sekolah dasar di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan pemahaman yang cukup baik pada aspek filosofis seperti kesetaraan, nondiskriminasi, dan pengakuan terhadap keberagaman, namun belum sepenuhnya menyentuh dimensi teknis seperti adaptasi kurikulum, strategi pembelajaran diferensial, asesmen alternatif, serta manajemen kelas inklusif. Para guru menyadari bahwa pendidikan inklusi memberikan dampak positif, seperti terpenuhinya hak belajar bagi semua anak, pembentukan sikap toleransi, dan kemampuan hidup rukun dalam keberagaman, namun mereka juga menghadapi tantangan besar, terutama potensi terjadinya bullying terhadap siswa berkebutuhan khusus, beban kerja yang meningkat akibat tuntutan administrasi dan perhatian ganda terhadap siswa, serta keterbatasan sumber daya dan pelatihan yang memadai. Observasi di lapangan memperlihatkan bahwa guru sering mengalami kelelahan fisik dan emosional dalam mengelola kelas inklusi, karena harus membagi perhatian secara adil tanpa dukungan sistemik yang memadai, seperti sarana prasarana yang sesuai, pelatihan berkelanjutan, dan kebijakan yang berpihak pada pelaksanaan pendidikan inklusi secara optimal. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan inklusi tidak hanya bergantung pada penerimaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum, tetapi juga pada komitmen dan kesiapan sistem pendidikan secara menyeluruh untuk menghadirkan lingkungan belajar yang adaptif, adil, dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Alkhateeb, J. M., Hadidi, M. S., & Al Khateeb, A. J. (2016). Inclusion of children with disabilities in the UAE: Teachers' attitudes and perspectives. *International Journal of Disability, Development and Education, 63*(5), 544–561. https://doi.org/10.1080/1034912X.2016.1142064

Anggadewi, L., & Evanjeli, M. A. (2022). Strategi Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar: Studi Literatur. *Jurnal Pendidikan Dasar*, *6*(1), 11–19.

Anwar, M. (2020). Pendidikan Inklusif: Teori dan Implementasi dalam Konteks Pendidikan Dasar. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, *4*(2), 45–56.

Bin, H., & Zin, M. (2018). Pendidikan inklusi di Indonesia: Kebijakan, tantangan, dan rekomendasi. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Pendidikan*, *7*(1), 1–12.

Elinda, D. (2021). Persepsi guru terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Anak*, *9*(1), 14–22.

Engelbrecht, P., Savolainen, H., Nel, M., & Malinen, O.-P. (2016). How cultural histories shape South African and Finnish teachers' attitudes towards inclusive education: A comparative analysis. *European Journal of Special Needs Education, 31*(3), 374–390.

Faujiyyah, N., Lestari, S., & Kurniawati, T. (2025). Implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, *20*(1), 33–42.

Febri, R., Hartini, N., & Munandar, A. (2024). Persepsi guru terhadap siswa berkebutuhan khusus dalam kelas reguler. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, *12*(1), 61–70.

Fitrianasari, R. (2015). Pendidikan inklusif dalam konteks global dan lokal. *Jurnal Pendidikan Khusus*, *3*(2), 21–30.

Galaterou, J., & Antoniou, A.-S. (2017). Teachers' self-efficacy beliefs and burnout in special and inclusive education. *Journal of Research in Special Educational Needs, 17*(2), 123–132.

Hakim Hidayat, F., Rahmatillah, N., & Zulfikar. (2024). Pendidikan inklusi dan keberagaman budaya di Indonesia. *Jurnal Multikultural dan Pendidikan*, *8*(1), 45–53.

Hassanein, E. E. A., Alshurman, M., & Ibrahim, M. S. (2021). Inclusive education in Egypt: Teachers' attitudes and perceived barriers. *International Journal of Inclusive Education*, *25*(4), 401–415.

Mayya, F. (2019). Analisis tingkat kesiapan guru terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. *Jurnal Pendidikan Guru*, *5*(2), 67–74.

Mngo, Z. Y., & Mngo, A. Y. (2018). Teachers' perceptions of inclusion in Cameroon secondary schools. *International Journal of Inclusive Education, 22*(2), 130–147.

Musya'adah, L. (2018). Pendidikan sebagai alat pembangunan manusia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, *4*(1), 17–24.

Pratiwi, A. (2024). Tinjauan kebijakan internasional dalam implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Evaluasi Pendidikan*, *11*(1), 1–9.

Saloviita, T. (2020). Attitudes of teachers towards inclusive education in Finland. *Scandinavian Journal of Educational Research, 64*(2), 270–282.

Sanisah, W., Rahmah, A., & Taufik, M. (2022). Tantangan dan solusi implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Khusus*, *10*(1), 15–24.

Sarwono, S. W. (2003). *Psikologi Sosial: Individu dan Pengaruh Sosialnya*. Jakarta: Balai Pustaka.

Syarif, M., & Jannah, R. (2024). Pelatihan guru dan efektivitas pembelajaran inklusi. *Jurnal Inklusif*, *6*(1), 78–85.

Tejaningrum, I. (2017). Pendidikan inklusi di sekolah dasar: Antara harapan dan realita. *Jurnal Pendidikan Dasar*, *2*(1), 39–47.

Vito, R. (2024). Kompetensi guru dalam menghadapi pendidikan inklusi. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, *13*(1), 91–98.

Wardah, N. (2019). Peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar inklusif. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *8*(2), 102–110.